

Empat Tahun Implementasi Reforma Agraria

Laporan Ringkas Konsorsium Pembaruan Agraria

Pendahuluan

Dalam Debat Calon Presiden 2019 ke-2 yang lalu (17/02), memantik perdebatan publik mengenai monopoli kekayaan agraria nasional di tangan segelintir orang dalam bentuk izin-izin konsesi skala besar, baik itu HGU, HGB, HTI dan izin-izin lainnya. Perdebatan ini sekaligus membuka tabir mendalamnya ketimpangan penguasaan tanah di Indonesia dan kerap memicu konflik agraria.

Hal tersebut membangkitkan ingatan kolektif publik bahwa selama ini distribusi alokasi sumber-sumber agraria nasional, utamanya tanah, belum menghadirkan rasa keadilan bagi mayoritas penduduk bangsa ini khususnya petani, nelayan, masyarakat adat, perempuan dan kaum miskin kota.

Sudah sama-sama kita ketahui, penyebab utama tingginya angka konflik agraria disebabkan pemberian izin-izin konsesi skala besar tersebut kepada perusahaan-perusahaan Negara maupun swasta. Sayangnya konsesi tersebut berada di atas lahan-lahan garapan masyarakat, ladang, pemukiman, hingga desa-desa yang telah berstatus definitif. Izin tersebut, diberikan pemerintahan masa sebelumnya maupun pemerintahan saat ini.

Mengapa Reforma Agraria?

Reforma Agraria adalah operasi penataan struktur agraria yang mengalami ketimpangan yang bertujuan menciptakan struktur baru yang lebih adil.

Dalam regulasi nasional, Presiden sebagai pimpinan tertinggi negara sejatinya merupakan mandatoris pelaksana reforma agraria untuk secara sistematis melalui kewenangan yang dimilikinya melaksanakan penyelesaian konflik dan merombak struktur ketimpangan agraria. Hal ini termaktub langsung dalam konstitusi negara kita, Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960. Mandat tersebut diperkuat melalui TAP MPR No. IX tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Sumber Daya Alam. Bahkan di era Jokowi, diperkuat lagi dengan Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.

Tujuan Reforma Agraria

Salah satu tujuan pokok reforma agraria adalah menyelesaikan konflik agraria yang kronis. Konflik agraria bukanlah persoalan sengketa tanah biasa, melainkan situasi yang bersifat *extra ordinary*, bisa merupakan warisan masa lalu atau pun kebijakan pemerintahan saat ini. Ia lahir akibat keputusan-keputusan pejabat publik yang secara sistematis melakukan penyingkiran dan penggusuran rakyat dalam jumlah yang besar secara paksa dari tanah-tanah dan tempat tinggal mereka untuk kemudian diberikan dan diterbitkan ijin konsesinya kepada perusahaan-perusahaan skala besar.

Konflik agraria bukan hanya melahirkan pertentangan antara dua pihak. Ia telah berdampak secara luas, baik dalam dimensi sosial, ekonomi, politik, dan hukum, dampak-dampak tersebut bisa dilihat diantaranya:

1. Tergusurnya rakyat dari tanah-tanah dan desa mereka. Hal ini secara langsung menghilangkan kepemilikan atas tanah, mata pencaharian, dan wilayah hidup yang berakibat hilangnya kehidupan sosial-budaya masyarakat.
2. Konflik agraria menyebabkan imigrasi besar-besarn penduduk desa. Mereka mencari wilayah-wilayah baru untuk mendapatkan tanah, menjadi buruh tani atau pergi ke kota menjadi tenaga kerja informal, buruh murah, menjadi golongan miskin perkotaan dan bahkan menjadi TKI/TKW.
3. Menyempitnya ruang hidup, diiringi menurunnya kemandirian rakyat dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka, utamanya pangan, akses pendidikan, kesehatan dsb.

4. Merosotnya kepercayaan masyarakat yang menjadi korban terhadap pemerintah, yang pada gilirannya bisa saja menggerus rasa ke-Indonesia-an para korban.
5. Meluasnya artikulasi konflik agraria ke bentuk-bentuk konflik lain, seperti konflik etnis, konflik antar kampung/desa, dan konflik antara “penduduk asli” dan “pendatang”.
6. Rapuhnya stabilitas nasional

Tidaklah mengherankan mengapa reforma agraria selalu menjadi tuntutan dan desakan rakyat pada setiap pemerintahan yang tengah berkuasa.

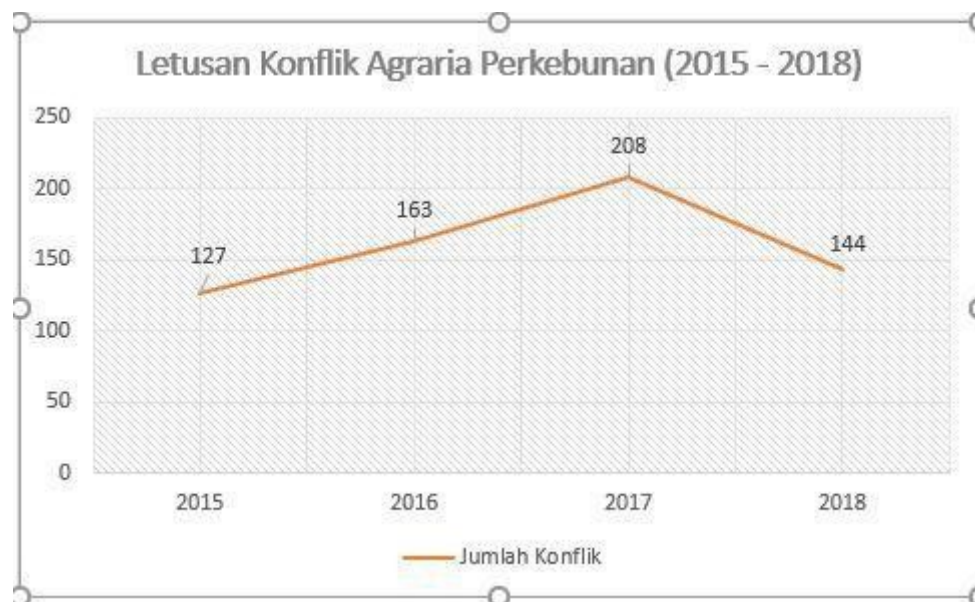
Perjalanan Empat Tahun Reforna Agraria Pemerintahan Jokowi-JK

A. Tingginya Konflik Agraria

Pada awal masa pemerintahannya telah menegaskan komitmen untuk menjalankan reforma agraria sebagai program prioritas melalui redistribusi tanah 9 juta hektar yang dibagi ke dalam 4,5 juta hektar redistribusi tanah dan 4,5 juta hektar legalisasi tanah kepada petani dan rakyat kecil. Sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019.

Dalam 4 tahun ini, pemerintah Jokowi-JK selalu dalam setiap kesempatan mengakui telah menjalankan reforma agraria melalui Perhutanan Sosial dan Sertifikasi Tanah. Namun luput membicarakan dan melaporkan perkembangan realisasi redistribusi tanahnya dan kepada siapa itu diberikan, baik janji redistribusi tanah dari konsesi perkebunan maupun dari konsesi hutan skala besar sebagaimana dijanjikan. Dalam rentang waktu tersebut, publik juga melihat anomali-anomali di lapangan, ditandai dengan terus meningkatnya eskalasi konflik, korban yang jatuh akibat penanganan yang represif kepada masyarakat oleh aparat dan keamanan swasta di lapangan.

Dalam 1 dekade pemerintahan SBY dan 4 tahun pemerintahan Jokowi, konflik agraria di wilayah perkebunan hampir selalu menempati posisi pertama. Periode 2015 – 2018, KPA mencatat sedikitnya telah terjadi 1771 letusan konflik agraria di Indonesia. Sebanyak 642 letusan konflik terjadi di sektor perkebunan yang melibatkan HGU-HGU perusahaan negara dan swasta.



Grafik Letusan Konflik Agraria di Sektor Perkebunan (2015 – 2018)

Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintahan menjalankan reforma agraria dengan cara yang kurang tepat. Bukankah implikasi langsung dari pelaksanaan reforma agraria adalah adanya penyelesaian konflik agraria secara langsung di lapangan dan menurunnya letusan konflik yang terjadi.

B. Realisasi Redistribusi Tanah Belum Menyasar Akar Masalah

Pemerintah Jokowi-JK menurunkan program 9 juta hektar program reforma agraria yang telah dicanangkan pada awal pemerintahannya melalui; **1) 400 ribu hektar redistribusi tanah dari HGU expired dan diterlantarkan perusahaan** 2) **4,1 juta hektar redistribusi tanah dari pelepasan klaim kawasan hutan**; 3) **3,9 juta hektar legalisasi aset**; dan 4) **600 ribu hektar legalisasi tanah-tanah transmigrasi yang belum disertifikatkan**.

Bulan Oktober 2018, Direktur Jendral Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN dalam Rapat Koordinasi Nasional Gugus Tugas Reforma Agraria memaparkan capaian-capaian program reforma agraria selama 4 tahun terakhir.

Kegiatan Reforma Agraria	Target RPJMN		Progress				Capaian RPJMN			Keterangan
	Jumlah	Satuan	s. d. 16 Oktober 2018				Bidang	Ha	%	
			Target	Realisasi						
			Bidang	Bidang	Ha	%				
Redistribusi Tanah	400.000	Ha	350.650	104.147	73.754	29,70	366.336	270.237	60,27	satuan Target RPJMN luas (Ha), target per tahun (bidang)
IP4T	18.206.340	Bidang	718.612	220.051	-	30,62	937.849	-	5,15	Target Bidang (bukan Ha)
Legalisasi Aset	3.900.000	Ha	7.000.000	3.632.914	654.708	51,90	9.834.111	2.273.424	58,29	satuan Target RPJMN luas (Ha), target per tahun (bidang)
Legalisasi Tanah Transmigrasi Masa Lalu	600.000	Ha	100.076	20.965	14.046	19,16	49.043	32.859	5,48	satuan Target RPJMN luas (Ha), target per tahun (bidang)
Pelepasan Kawasan Hutan	4.100.000	Ha			994.761	0,24				
9 juta hektar, plus 18 ribu bidang										

Capaian Reforma Agraria Pemerintah Jokowi-JK (Dirjen Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN)

Hasilnya, dari 400 ribu hektar target redistribusi tanah yang dicanangkan pemerintah, baru 270.237 hektar yang terealisasi. Namun dalam catatan monitoring KPA, baru 785 hektar yang didistribusikan sesuai dengan tujuan dan prinsip reforma agraria, yakni Desa Mangkit di Sulawesi Utara, Desa Pamegatan dan Pasawahian di Jawa Barat dan Desa Tumbrek di Jawa Tengah. Desa-desanya ini adalah wilayah konflik agraria masyarakat dengan HGU swasta, dimana penerima manfaatnya betul-betul petani dan masyarakat kecil di pedesaan, yang selama puluhan tahun mengalami ketidakadilan dan telah memperjuangkan haknya atas tanah ke berbagai kementerian.

Sisanya, kuat diduga antara kesesuaian obyek (tanah) dan subyek (penerima) redistribusi tanah salah sasaran dan tidak sesuai tujuan-tujuan reforma agraria. Termasuk tidak adanya program penunjang paska redistribusi tersebut dilakukan, sebagai syarat dari reforma agraria. Berhenti dibagi-bagi sertifikat (rutin) Kementerian ATR/BPN saja.

Sempitnya Ruang Partisipasi Rakyat

Dalam kurun waktu 4 tahun, KPA bersama serikat-serikat petani dan organisasi masyarakat adat telah menyerahkan data-data Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) di kawasan hutan maupun di wilayah

perkebunan. Wilayah LPRA tersebut berada di atas tanah seluas 668.383 hektar, melibatkan 147.446 KK dan tersebar di 461 desa/kampung, 98 Kabupaten dan 20 Provinsi.

Mengapa disebut LPRA: karena lokasi tersebut adalah tempat dimana terjadi kesesuaian antara subjek (penerima tanah) dan objek. Karena hal ini, lokasi-lokasi tersebut seharusnya menjadi prioritas pelaksanaan reforma agraria oleh pemerintah.

Berdasarkan data LPRA – KPA tersebut, sedikitnya terdapat 288.431 hektar konflik agraria disebabkan HGU PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) yang melibatkan PTPN II, PTPN III, PTPN IV, PTPN VII, PTPN VIII, PTPN IX, PTPN XII, dan PTPN XIV.

Sementara, seluas 123.064 hektar konflik agraria disebabkan HGU-HGU puluhan perusahaan swasta, seperti PT. London Sumatra (Lonsum) milik Salim Group, PT. Tiran milik Menteri Pertanian Amran Sulaiman, PT. Toba Pulp Lestari milik Sukanto Tanoto, hingga PT. Asiatik milik Wilmar Group. Perusahaan-perusahaan tersebut di atas selama puluhan tahun telah beroperasi dengan cara merampas tanah-tanah masyarakat – *daftar perusahaan pemilik konsesi terlampir.*

LPRA Dalam HGU PTPN:

PROVINSI	JUMLAH LOKASI	LUAS (Hektar)
Jawa Barat	8	1.915
Jawa Tengah	11	1.960
Jawa Timur	17	5.813
Lampung	1	1.700
Sulawesi Selatan	7	9.517
Sulawesi Tengah	2	1.935
Sumatera Selatan	1	3.218
Sumatera Utara	84	262.373
Jumlah	131	288.431

LPRA Dalam HGU Perusahaan Swasta:

PROVINSI	JUMLAH LOKASI	LUAS (Hektar)
Bali	1	583
Banten	2	199
Bengkulu	17	7.767
Jambi	1	1.739
Jawa Barat	16	3.849
Jawa Tengah	13	2.318
Jawa Timur	5	2.154
Lampung	2	3.225
Sulawesi Selatan	2	23.753
Sulawesi Tengah	8	19.259
Sulawesi Tenggara	14	38.446
Sulawesi Utara	2	463
Sumatera Barat	1	2.490
Sumatera Selatan	3	4.531
Sumatera Utara	6	12.258
Jumlah	93	123.034

Sementara itu, dari janji reforma agraria 4,1 juta hektar pelepasan kawasan hutan belum ada realisasi sama sekali, alias **nol hektar**. Padahal, konflik agraria di wilayah hutan tidak kalah pentingnya. Terjadi klaim sepihak kawasan hutan oleh pemerintah, hingga pemberian izin konsesi hutan untuk perusahaan negara dan swasta. Setiap hari mereka terancam oleh intimidasi, kekrasan hingga penggusuran oleh Perum Perhutani, perusahaan kehutanan, Balai Konservasi Sumber Daya Alam bahkan dinas kehutanan. Puluhan ribu desa dan kampung serta garapan warga masih berada dalam klaim Kawasan hutan. Tidak setiap masalah konflik agrarian dengan Kawasan hutan dapat diselesaikan dengan skema perhutanan social, semata. Pengakuan dan pemilikan penuh melalui reforma agrarian di Kawasan hutan mutlak dijalankan.

Sementara itu, laporan data LPRA-KPA telah diserahkan kepada pemerintah sebanyak 218 lokasi garapan, kampung dan desa seluas 251.939 hektar berkonflik di kawasan hutan. Sebanyak 76 ribu kepala keluarga (KK) belum memperoleh kejelasan nasibnya hingga saat ini.

Kebijakan dan Kelembagaan Reforma Agraria

Dalam menjalankan reforma agraria, setidaknya dibutuhkan data akurat yang berasal dari usulan-usulan masyarakat, serta regulasi dan kelembagaan otoritatif yang berada langsung di bawah presiden.

Sebenarnya, pemerintah pun tidak kekurangan regulasi yang sejatinya mendukung program reforma agraria. Diantaranyas, UUPA 1960, TAP MPR IX/2001, PP 11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.

Untuk merealisasikan dan mempercepat RA, tahun lalu Pemerintah mengeluarkan Perpres Reforma Agraria No. 86 tahun 2018 dan Inpres Moratorium Sawit di sektor perkebunan. Artinya, telah terdapat kemauan politik presiden mengenai reforma agraria.

Perpres ini diharapkan menjadi panduan agar masing-masing kementerian yang diberi tugas menjalankan reforma agraria tidak berjalan sendiri-sendiri. Meski Perpres telah diteken Presiden, nampaknya Kemenko Perekonomian sebagai Ketua dari Tim Reforma Agraria Pusat belum tancap gas menjalankan RA. Begitu pun Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di nasional yang dipimpin oleh Menteri ATR/BPN RI, kembali hanya fokus mempercepat acara-acara pembagian sertifikat tanah, lambat menjalankan redistribusi tanah kepada petani kecil dan buruh tani (petani tak bertanah), apalagi mengurus wilayah-wilayah konflik agraria.

Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang harus dibentuk di daerah (provinsi dan kabupaten) sebagai kelanjutan Perpres juga belum bergerak. Bahkan banyak yang tidak melibatkan masyarakat. Dari 32 GTRA Provinsi yang telah dibentuk, hanya 6 GTRA yang melibatkan partisipasi organisasi masyarakat pegiat reforma agrarian.

Dari sisi kebijakan, lahirnya Perpres RA sebagai regulasi yang bersifat implementatif sesungguhnya menjadi kabar baik bagi rakyat yang selama puluhan tahun menantikan reforma agraria. Namun patut dicatat, secara substansi Perpres RA belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat yang memperjuangkan reforma agraria yang *genuine*. Sebab terdapat inkonsistensi dan kelemahan khususnya antara tujuan dalam peraturan tersebut dengan objek, subjek, kelembagaan pelaksana dan proses pelaksanaan reforma agraria.

Rekomendasi atas Pelaksanaan Reforma Agraria Pemerintahan Jokowi-JK

Berdasarkan fakta-fakta di atas, kami mengingatkan kembali pemerintah untuk mengembalikan reforma agraria pada tujuan awalnya sebagai satu upaya sistematis melakukan penataan ulang susunan pemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber-sumber agraria (terutama tanah) menjadi lebih berkeadilan, untuk kepentingan rakyat kecil (petani, buruh tani, masyarakat adat, nelayan, kaum miskin kota). Juga disertai program penunjang sebagai satu paket dari langkah redistribusi tanah.

Menurut kami, agenda reforma agraria dapat terlaksana dengan baik jika pemerintah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Membentuk Badan Otoritas Reforma Agraria (BORA) yang berifat *ad-hoc*, lintas sektor, kredibel, partisipatif dan otoritatif yang langsung dipimpin oleh presiden.
2. Melaksanakan penyelesaian konflik agraria di wilayah-wilayah perkebunan negara dan swasta sebagai agenda prioritas berdasarkan data-data usulan masyarakat (LPRA).
3. Membuka informasi kepada publik dan mengevaluasi konsesi-konsesi perusahaan perkebunan Negara maupun swasta (HGU, HGB, ijin lokasi, dsb) sehingga mendorong sistem pertanahan yang transparan. Keterbukaan ini juga dapat menjadi jalan bagi pencegahan dan penyelesaian konflik serta rencana mengurangi ketimpangan yang telah terjadi.
4. Mengeluarkan desa-desa dan garapan masyarakat dalam HGU dan kawasan hutan. Selain itu, melakukan moratorium ijin baru maupun perpanjangan HGU di seluruh sektor perkebunan kepada korporasi skala besar sebagai komitmen utuh reforma agraria,
5. Menghentikan pendekatan-pendekatan keamanan dan represif dalam menangani konflik agraria di lapangan, selaras dengan pemulihan hak-hak korban konflik dan kriminalisasi agraria.
6. Sejalan dengan langkah-langkah di atas, dalam rangka percepatan dan pelurusan reforma agraria, sisa waktu pemerintahan ini sebaiknya memaksimalkan mandate UUPA 1960 dan peran Perpres Reforma Agraria untuk menjawab tumpang tindih dan kebuntuan regulasi yang menghambat rakyat memperoleh pengakuan dan haknya atas tanah.

Demikianlah laporan tinjauan, evaluasi dan rekomendasi ini kami buat, untuk dipahami oleh semua pihak.

Jakarta, 4 Maret 2019

Konsorsium Pembaruan Agraria

Dewi Kartika
Sekretaris Jenderal

Lampiran:

1. Data HGU – PTPN yang Berkonflik dengan Masyarakat
2. Data HGU Perusahaan Swasta yang Berkonflik dengan Masyarakat

KONSORSIUM PEMBARUAN AGRARIA, 2019
DATA LOKASI PRIORITAS REFORMA AGRARIA DI DALAM HGU BUMN/NEGARA

No	Lokasi					Organisasi Rakyat/NGO	Luas Wilayah (Ha)	Status Tanah/Hak Atas Tanah	Regulasi Penyelesaian Konflik	NAMA PERUSAHAAN
	Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Kampung					
1	Jawa Barat	Cianjur	Pagelaran	Mekarsari		Paguyuban Petani Cianjur (PPC)	221	Tanah Terlantar Bekas HGU	- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No. 50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per — 02/Mbu/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Perkebunan Nusantara VIII
2	Jawa Barat	Garut	Cilawu	Dangiang, sukamukti dan Mekarmukti	Dangiang, sukamukti dan Mekarmukti	Serikat Petani Pasundan Garut (SPP Garut)	138.25	Tanah Terlantar Bekas HGU	- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No. 50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per — 02/Mbu/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Perkebunan Nusantara VIII
3	Jawa Barat	Garut	Cisompet	Sindang Sari	Benjang, cikeuyeup	Serikat Petani Pasundan Garut (SPP Garut)	71	Tanah Terlantar Bekas HGU	- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No. 50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per — 02/Mbu/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Perkebunan Nusantara VIII
4	Jawa Barat	Garut	Cisompet	Neglasari, Jatisari	Neglasari, jatisari	Serikat Petani Pasundan Garut (SPP Garut)	346	Tanah Terlantar Bekas HGU	- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No. 50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per — 02/Mbu/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar	PT. Perkebunan Nusantara VIII

									- Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang Reforma Agraria	
5	Jawa Barat	Garut	Cibalong	Sagara	Sagara	Serikat Petani Pasundan Garut (SPP Garut)	190	Tanah Terlantar Bekas HGU	- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No. 50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per — 02/Mbu/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Perkebunan Nusantara VIII
6	Jawa Barat	Garut	Cibalong	Karyasari	Karyasari	Serikat Petani Pasundan Garut (SPP Garut)	134	Tanah Terlantar Bekas HGU	- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No. 50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per — 02/Mbu/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Perkebunan Nusantara VIII

No	Lokasi					Organisasi Rakyat/NGO	Luas Wilayah (Ha)	Status Tanah/Hak Atas Tanah	Regulasi Penyelesaian Konflik	NAMA PERUSAHAAN
	Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Kampung					
7	Jawa Barat	Tasikmalaya	Nagrog	Cipatujah	Cikanyere	Serikat Petani Pasundan Tasikmalaya (SPP Tasikmalaya)	215	Tanah Terlantar Bekas HGU	- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No. 50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per — 02/Mbu/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Perkebunan Nusantara VIII
8	Jawa Barat	Tasikmalaya	Cikatomas	Sindangasih	Cieceng, mekarharuman, tenjolaya dan Sinagar	Serikat Petani Pasundan Tasikmalaya (SPP Tasikmalaya)	600	Tanah Terlantar Bekas HGU	- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No. 50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per — 02/Mbu/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Perkebunan Nusantara VIII
9	Jawa Tengah	Sragen	Sambirejo	BAYANAN, JAMBEYAN	PAKIS, SUNGGINGAN, BAYUT, BAYANAN, TAWANGSARI, BULU, WONOREJO, PONDOK, JETIS	Forum Peduli Kebenaran dan Keadilan Sambirejo (FPKKS)	446	Tanah Terlantar Bekas HGU	- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No. 50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per — 02/Mbu/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Perkebunan Nusantara IX
10	Jawa Tengah	Cilacap	Cimanggung	Karangreja		Serikat Tani Mandiri (SETAM)	502	Tanah Sedimentasi	- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No. 50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per — 02/Mbu/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Perkebunan Nusantara IX

									Agraria	
11	Jawa Tengah	Cilacap	Dayeuhluhur	Dayeuhluhur		Serikat Tani Mandiri (SETAM)	73	Tanah Sedimentasi	- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No. 50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per — 02/Mbu/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva - Tetap Badan Usaha Milik Negara - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Perkebunan Nusantara IX
12	Jawa Tengah	Cilacap	Cipari	Karangreja		Serikat Tani Mandiri (SETAM)	32	Tanah Sedimentasi	- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No. 50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per — 02/Mbu/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva - Tetap Badan Usaha Milik Negara - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Perkebunan Nusantara IX

No	Lokasi					Organisasi Rakyat/NGO	Luas Wilayah (Ha)	Status Tanah/Hak Atas Tanah	Regulasi Penyelesaian Konflik	NAMA PERUSAHAAN
	Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Kampung					
13	Jawa Tengah	Cilacap	Cipari	Sidasari		Serikat Tani Mandiri (SETAM)	450	Tanah Sedimentasi	- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No. 50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per — 02/Mbu/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Perkebunan Nusantara IX
14	Jawa Tengah	Cilacap	Cipari	Caruwi I, Caruwi II, Mekarsari		Serikat Tani Mandiri (SETAM)	2.3	Tanah Terlantar Bekas HGU	- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No. 50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per — 02/Mbu/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Perkebunan Nusantara IX
15	Jawa Tengah	Cilacap	Cipari	Mekarsari	Pitulasi	Serikat Tani Mandiri (SETAM)	2.5	Tanah Terlantar Bekas HGU	- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No. 50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per — 02/Mbu/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Perkebunan Nusantara VIII
16	Jawa Tengah	Cilacap	Cipari	Cisuru		PP. SeTAM	200	Tanah Terlantar Bekas HGU	- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No. 50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per — 02/Mbu/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Perkebunan Nusantara IX

17	Jawa Tengah	Cilacap	Wanareja	Bantar		Serikat Tani Mandiri (SETAM)	63	Tanah Terlantar Bekas HGU	- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No. 50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per — 02/Mbu/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Perkebunan Nusantara IX
18	Jawa Timur	Malang	Dampit, Tirtoyudo, Ampelgading	Simojayan, Tlogosari, Tirtoyudo, Bumirejo, Kepatihan	Kalibakar	Forum Komunikasi Tani Malang Selatan (FORKOTMAS)	2050	Tanah Terlantar Bekas HGU	- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No. 50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per — 02/Mbu/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Perkebunan Nusantara XII

No	Lokasi					Organisasi Rakyat/NGO	Luas Wilayah (Ha)	Status Tanah/Hak Atas Tanah	Regulasi Penyelesaian Konflik	NAMA PERUSAHAAN
	Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Kampung					
19	Jawa Timur	Kediri	Puncu	Satak	Satak	Serikat Rakyat Kediri Berdaulat (SRKB)	477	Tanah Terlantar Bekas HGU	- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No. 50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per — 02/Mbu/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Perkebunan Nusantara XII
20	Jawa Timur	Kediri	Plosoklaten	Sepawon	Ngrangkah dan Badek	Serikat Rakyat Kediri Berdaulat (SRKB)	702	Tanah Terlantar Bekas HGU	- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No. 50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per — 02/Mbu/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Perkebunan Nusantara XII
21	Jawa Timur	Jember	Tempurejo	Curahnongko	Krajan	Serikat Tani Independen (SEKTI)	274.37	Tanah Hak Milik	- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No. 50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per — 02/Mbu/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Perkebunan Nusantara XII
22	Jawa Timur	Jember	Tempurejo	curahtakir	punco	Serikat Tani Independen (SEKTI)	105	Tanah Hak Milik	- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No. 50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per — 02/Mbu/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Perkebunan Nusantara XII

									Agraria	
23	Jawa Timur	Jember	Tempurejo	curahtakir	ampelan 42	Serikat Tani Independen (SEKTI)	45	Tanah Hak Milik	- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No. 50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per — 02/Mbu/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Perkebunan Nusantara XII
24	Jawa Timur	Jember	Tempurejo	curahtakir	kebon dadap	Serikat Tani Independen (SEKTI)	19	Tanah Hak Milik	- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No. 50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per — 02/Mbu/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Perkebunan Nusantara XII

No	Lokasi					Organisasi Rakyat/NGO	Luas Wilayah (Ha)	Status Tanah/Hak Atas Tanah	Regulasi Penyelesaian Konflik	NAMA PERUSAHAAN
	Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Kampung					
25	Jawa Timur	Jember	Tempurejo	curahtakir	ampelan 14 karangharjo	Serikat Tani Independen (SEKTI)	25	Tanah Hak Milik	- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No. 50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per — 02/Mbu/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Perkebunan Nusantara XII
26	Jawa Timur	Jember	Rambipuji	Nogosari	Gumukbagu	Serikat Tani Independen (SEKTI)	375	Tanah HGU Aktif	- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No. 50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per — 02/Mbu/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Perkebunan Nusantara XII
27	Jawa Timur	Jember	Mumbulsari	Mumbulsari	krajan	Serikat Tani Independen (SEKTI)	28	Tanah Terlantar Bekas HGU	- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No. 50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per — 02/Mbu/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Perkebunan Nusantara XII
28	Jawa Timur	Jember	Mumbulsari	Mumbulsari	sumber tengah	Serikat Tani Independen (SEKTI)	5	Tanah Terlantar Bekas HGU	- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No. 50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per — 02/Mbu/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018	PT. Perkebunan Nusantara XII

									tentang Reforma Agraria	
29	Jawa Timur	Jember	Mumbulsari	Mumbulsari	Langsanah	Serikat Tani Independen (SEKTI)	3	Tanah Terlantar Bekas HGU	- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No. 50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per – 02/Mbu/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Perkebunan Nusantara XII
30	Jawa Timur	Jember	Mumbulsari	Mumbulsari	Gambiran	Serikat Tani Independen (SEKTI)	85	Tanah Terlantar Bekas HGU	- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No. 50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per – 02/Mbu/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Perkebunan Nusantara XII

No	Lokasi					Organisasi Rakyat/NGO	Luas Wilayah (Ha)	Status Tanah/Hak Atas Tanah	Regulasi Penyelesaian Konflik	NAMA PERUSAHAAN
	Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Kampung					
31	Jawa Timur	Jember	Panti	Pakis dan Suci	Ketajek	Serikat Tani Independen (SEKTI)	472	Tanah Terlantar Bekas HGU	- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No. 50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per — 02/Mbu/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Perkebunan Nusantara XII
32	Jawa Timur	Jember	ajung	Mangaran		Serikat Tani Independen (SEKTI)	241	Tanah Terlantar Bekas HGU	- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No. 50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per — 02/Mbu/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Perkebunan Nusantara XII
33	Jawa Tengah	Kendal	Pageruyung	Desa Surokonto Wetan dan Desa Surokonto Kulon		Lembaga Bantuan Hukum Semarang (LBH SEMARANG)	128	Tanah Hak Milik Terlantar	- Percepatan Proses Penetapan Tanah Terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah - Redistribusi Tanah melalui Perpres No86/2018 tentang Reforma Agraria	PT Semen Indonesia, Perhutani & Pemda
34	Jawa Tengah	Kendal	SINGOROJO	Banyuringin		Lembaga Bantuan Hukum Semarang (LBH SEMARANG)	62	Tanah Hak Milik Terlantar	- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No. 50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per — 02/Mbu/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Pekebunan Nusantara IX
35	Jawa Timur	Blitar	Wates	Ringinrejo	Gondang Tapen	Paguyuban Petani Aryo Blitar (PPAB) dan Sitas Desa	725	Tanah Hak Milik Terlantar	- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No. 50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per — 02/Mbu/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010	Perhutani/PT Semen Holcim (Tukar Guling)

									Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang Reforma Agraria	
36	Jawa Timur	Blitar	Nglegok	Penataran	Penataran	Paguyuban Petani Aryo Blitar (PPAB) dan Sitas Desa	182	Tanah Terlantar Bekas HGU	- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No. 50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per – 02/Mbu/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Perkebunan Nusantara XII
37	Sulawesi Tengah	Morowali Utara	Mori Atas	Lee		Serikat Tani Pejuang Tanah Air	1,895	Tanah HGU Aktif	- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No. 50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per – 02/Mbu/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Perkebunan Nusantara XIV

No	Lokasi					Organisasi Rakyat/NGO	Luas Wilayah (Ha)	Status Tanah/Hak Atas Tanah	Regulasi Penyelesaian Konflik	NAMA PERUSAHAAN
	Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Kampung					
38	Sulawesi Tengah	Morowali Utara	Mori Atas	kasingoli	kasingoli	Serikat Tani Pejuang Tanah Air	40	Tanah HGU Aktif	- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No. 50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per — 02/Mbu/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Perkebunan Nusantara
39	Sulawesi Selatan	Enrekang	Maiwa - Cendana	Botto Malangga, Batu Mila, Pattondon Salu, Bangkala, Karrang		Konsorsium Pembaruan Agraria	5.230	Tanah Terlantar Bekas HGU	- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No. 50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per — 02/Mbu/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Perkebunan Nusantara XIV
40	Sulawesi Selatan	Luwu Timur	Angkona	Mantadulu		Konsorsium Pembaruan Agraria	570	Tanah Hak Milik Transmigrasi	- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No. 50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per — 02/Mbu/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Perkebunan Nusantara XIV
41	Sulawesi Selatan	Luwu Timur	MALILI	HARAPAN	UPT SP II LAMPPIA	Konsorsium Pembaruan Agraria	800	Tanah Hak Milik Transmigrasi	- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No. 50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per — 02/Mbu/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Perkebunan Nusantara XIV
									- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No.	

42	Sulawesi Selatan	Wajo	Keera	Ciromanie, Awota, Awo, Inrello dan Labawang		Forum Rakyat Bersatu (FRB) Keera.	1,934	Tanah HGU Aktif	50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per — 02/Mbu/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Perkebunan Nusantara XIV
43	Sulawesi Selatan	Luwu Utara	Mappedeceng	Uraso	Likudengen, Massapi, Timboni, Tuwu, Rante Lebanu	Perkumpulan WALLACEA Palopo	413	Tanah Adat	- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No. 50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per — 02/Mbu/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Perkebunan Nusantara XIV

No	Lokasi					Organisasi Rakyat/NGO	Luas Wilayah (Ha)	Status Tanah/Hak Atas Tanah	Regulasi Penyelesaian Konflik	NAMA PERUSAHAAN
	Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Kampung					
44	Sulawesi Selatan	Takalar	Polongbangkeng Utara	Parang Luara		Solidaritas Perempuan Anging Mammiri Makassar	272	Tanah HGU Aktif	- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No. 50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per — 02/Mbu/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Perkebunan Nusantara XIV
45	Sulawesi Selatan	Takalar	Polongbangkeng Utara	Lassang Barat		Solidaritas Perempuan Anging Mammiri Makassar	297	Tanah HGU Aktif	- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No. 50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per — 02/Mbu/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Perkebunan Nusantara XIV
46	Sumatera Utara	Deli Serdang	Batang kuis	Kampung baru	Kampung baru	Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI)	838	Tanah Adat	- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No. 50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per — 02/Mbu/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Perkebunan Nusantara II
47	Sumatera Utara	Deli Serdang	Batang kuis	batang kuis pekan	Kampung batang kuis pekan	Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI)	576	Tanah Adat	- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No. 50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per — 02/Mbu/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Perkebunan Nusantara II
									- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No.	

48	Sumatera Utara	Deli Serdang	Percut Sei Tuan	bandar klippa	Kampong bandar klippa	Badan Perjuangan Rakyat Penungu Indonesia (BPRPI)	1,751	Tanah Adat	50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per — 02/Mbu/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Perkebunan Nusantara II
49	Sumatera Utara	Deli Serdang	Tanjung Morawa	bandar labuhan	Kampong bandar labuhan	Badan Perjuangan Rakyat Penungu Indonesia (BPRPI)	1,448	Tanah Adat	- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No. 50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per — 02/Mbu/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Perkebunan Nusantara II

No	Lokasi					Organisasi Rakyat/NGO	Luas Wilayah (Ha)	Status Tanah/Hak Atas Tanah	Regulasi Penyelesaian Konflik	NAMA PERUSAHAAN
	Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Kampung					
50	Sumatera Utara	Deli Serdang	Percut Sei Tuan	bandar setia	Kampung bandar setia	Badan Perjuangan Rakyat Penungu Indonesia (BPRPI)	432	Tanah Adat	- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No. 50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per — 02/Mbu/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Perkebunan Nusantara II
51	Sumatera Utara	Deli Serdang	Tanjung Morawa	bangun rejo	Kampung bangun rejo	Badan Perjuangan Rakyat Penungu Indonesia (BPRPI)	1,646	Tanah Adat	- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No. 50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per — 02/Mbu/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Perkebunan Nusantara II
52	Sumatera Utara	Deli Serdang	Beringin	Beringin	Kampung beringin	Badan Perjuangan Rakyat Penungu Indonesia (BPRPI)	7,894	Tanah Adat	- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No. 50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per — 02/Mbu/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Perkebunan Nusantara II
53	Sumatera Utara	Deli Serdang	Pancur Batu	bintang meriah	Kampung bintang meriah	Badan Perjuangan Rakyat Penungu Indonesia (BPRPI)	646	Tanah Adat	- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No. 50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per — 02/Mbu/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018	PT. Perkebunan Nusantara II

									tentang Reforma Agraria	
54	Sumatera Utara	Deli Serdang	Hamparan Perak	Bulu Cina	Kampong baluh cina	Badan Perjuangan Rakyat Penungu Indonesia (BPRPI)	1,975	Tanah Adat	- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No. 50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per – 02/Mbu/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Perkebunan Nusantara II
55	Sumatera Utara	Deli Serdang			Kampong dagang krawang	Badan Perjuangan Rakyat Penungu Indonesia (BPRPI)	3,026	Tanah Adat	- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No. 50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per – 02/Mbu/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Perkebunan Nusantara II

No	Lokasi					Organisasi Rakyat/NGO	Luas Wilayah (Ha)	Status Tanah/Hak Atas Tanah	Regulasi Penyelesaian Konflik	NAMA PERUSAHAAN
	Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Kampung					
56	Sumatera Utara	Deli Serdang	Tanjung Morawa	Dalu X	Kampung dalu 10	Badan Perjuangan Rakyat Penungu Indonesia (BPRPI)	1,125	Tanah Adat	- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No. 50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per — 02/Mbu/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Perkebunan Nusantara II
57	Sumatera Utara	Deli Serdang	Deli Tua	Kampung deli tua	Kampung deli tua	Badan Perjuangan Rakyat Penungu Indonesia (BPRPI)	6,939	Tanah Adat	- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No. 50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per — 02/Mbu/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Perkebunan Nusantara II
58	Sumatera Utara	Deli Serdang	Pantai Labu	denai kwala	Kampung denai kwala	Badan Perjuangan Rakyat Penungu Indonesia (BPRPI)	2,078	Tanah Adat	- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No. 50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per — 02/Mbu/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Perkebunan Nusantara II
59	Sumatera Utara	Deli Serdang	Hamparan Perak	Klambir Lima Kampung	Kampung klambir V	Badan Perjuangan Rakyat Penungu Indonesia (BPRPI)	3,971	Tanah Adat	- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No. 50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per — 02/Mbu/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018	PT. Perkebunan Nusantara II

									tentang Reforma Agraria	
60	Sumatera Utara	Deli Serdang	Hamparan Perak	Klambir	Kampung klambir	Badan Perjuangan Rakyat Penungu Indonesia (BPRPI)	6,427	Tanah Adat	- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No. 50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per – 02/Mbu/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Perkebunan Nusantara II
61	Sumatera Utara	Deli Serdang	Hamparan Perak	Klumpang	Kampung klumpang	Badan Perjuangan Rakyat Penungu Indonesia (BPRPI)	1,239	Tanah Adat	- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No. 50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per – 02/Mbu/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Perkebunan Nusantara II

No	Lokasi					Organisasi Rakyat/NGO	Luas Wilayah (Ha)	Status Tanah/Hak Atas Tanah	Regulasi Penyelesaian Konflik	NAMA PERUSAHAAN
	Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Kampung					
62	Sumatera Utara	Deli Serdang			Kampung kramat tulang pusu	Badan Perjuangan Rakyat Penungu Indonesia (BPRPI)	642	Tanah Adat	- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No. 50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per — 02/Mbu/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Perkebunan Nusantara II
63	Sumatera Utara	Deli Serdang	Kutalimbaru		Kampung kotalimbaru	Badan Perjuangan Rakyat Penungu Indonesia (BPRPI)	14,901	Tanah Adat	- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No. 50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per — 02/Mbu/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Perkebunan Nusantara II
64	Sumatera Utara	Deli Serdang	Hamparan Perak	Kampung Lama	Kampung lama	Badan Perjuangan Rakyat Penungu Indonesia (BPRPI)	21,185	Tanah Adat	- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No. 50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per — 02/Mbu/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Perkebunan Nusantara II
65	Sumatera Utara	Deli Serdang	Lubuk Pakam		Kampung lubuk pakam	Badan Perjuangan Rakyat Penungu Indonesia (BPRPI)	6,214	Tanah Adat	- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No. 50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per — 02/Mbu/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018	PT. Perkebunan Nusantara II

									tentang Reforma Agraria	
66	Sumatera Utara	Deli Serdang	Batang Kuis	Mesjid	Kampung mesjid	Badan Perjuangan Rakyat Penungu Indonesia (BPRPI)	1,140	Tanah Adat	- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No. 50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per – 02/Mbu/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Perkebunan Nusantara II
67	Sumatera Utara	Deli Serdang	pagar merbau	pagar merbau	Kampung pagar merbau	Badan Perjuangan Rakyat Penungu Indonesia (BPRPI)	4,549	Tanah Adat	- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No. 50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per – 02/Mbu/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Perkebunan Nusantara II

No	Lokasi					Organisasi Rakyat/NGO	Luas Wilayah (Ha)	Status Tanah/Hak Atas Tanah	Regulasi Penyelesaian Konflik	NAMA PERUSAHAAN
	Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Kampung					
68	Sumatera Utara	Deli Serdang	Pantai Labu	Paluh Sibaji	Kampung paloh sibaji	Badan Perjuangan Rakyat Penungu Indonesia (BPRPI)	1,922	Tanah Adat	- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No. 50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per — 02/Mbu/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Perkebunan Nusantara II
69	Sumatera Utara	Deli Serdang	Patumbak	Patumbak	Kampung patumbak	Badan Perjuangan Rakyat Penungu Indonesia (BPRPI)	3,071	Tanah Adat	- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No. 50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per — 02/Mbu/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Perkebunan Nusantara II
70	Sumatera Utara	Deli Serdang	Batang Kuis	Paya Gambar	Kampung paya gambar	Badan Perjuangan Rakyat Penungu Indonesia (BPRPI)	768	Tanah Adat	- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No. 50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per — 02/Mbu/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Perkebunan Nusantara II
71	Sumatera Utara	Deli Serdang	Tanjung Morawa	Penara	Kampung penara	Badan Perjuangan Rakyat Penungu Indonesia (BPRPI)	2,504	Tanah Adat	- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No. 50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per — 02/Mbu/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018	PT. Perkebunan Nusantara II

									tentang Reforma Agraria	
72	Sumatera Utara	Deli Serdang	Percut Sei Tuan	Saentis	Kampong saentis	Badan Perjuangan Rakyat Penungu Indonesia (BPRPI)	3,325	Tanah Adat	- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No. 50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per – 02/Mbu/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Perkebunan Nusantara II
73	Sumatera Utara	Deli Serdang	Percut Sei Tuan	Sampali	Kampong sampali	Badan Perjuangan Rakyat Penungu Indonesia (BPRPI)	1,914	Tanah Adat	- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No. 50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per – 02/Mbu/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Perkebunan Nusantara II

No	Lokasi					Organisasi Rakyat/NGO	Luas Wilayah (Ha)	Status Tanah/Hak Atas Tanah	Regulasi Penyelesaian Konflik	NAMA PERUSAHAAN
	Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Kampung					
74	Sumatera Utara	Deli Serdang			Kampung sei jernih	Badan Perjuangan Rakyat Penungu Indonesia (BPRPI)	2,362	Tanah Adat	- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No. 50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per — 02/Mbu/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Perkebunan Nusantara II
75	Sumatera Utara	Deli Serdang	Hamparan Perak	Sialang Muda	Kampung sialang muda rusif	Badan Perjuangan Rakyat Penungu Indonesia (BPRPI)	2,526	Tanah Adat	- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No. 50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per — 02/Mbu/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Perkebunan Nusantara II
76	Sumatera Utara	Deli Serdang	Patumbak	Sigara Gara	Kampung sigara gara	Badan Perjuangan Rakyat Penungu Indonesia (BPRPI)	1,264	Tanah Adat	- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No. 50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per — 02/Mbu/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Perkebunan Nusantara II
77	Sumatera Utara	Deli Serdang	Batang Kuis	Sugiharjo	Kampung sugiharjo	Badan Perjuangan Rakyat Penungu Indonesia (BPRPI)	662	Tanah Adat	- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No. 50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per — 02/Mbu/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Perkebunan Nusantara II

									Agraria	
78	Sumatera Utara	Deli Serdang			Kampong tadukan raja	Badan Perjuangan Rakyat Penungu Indonesia (BPRPI)	1,170	Tanah Adat	- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No. 50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per — 02/Mbu/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Perkebunan Nusantara II
79	Sumatera Utara	Deli Serdang	Percut Sei Tuan	Saentis	Kampong tambak bayan	Badan Perjuangan Rakyat Penungu Indonesia (BPRPI)	878	Tanah Adat	- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No. 50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per — 02/Mbu/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Perkebunan Nusantara II

No	Lokasi					Organisasi Rakyat/NGO	Luas Wilayah (Ha)	Status Tanah/Hak Atas Tanah	Regulasi Penyelesaian Konflik	NAMA PERUSAHAAN
	Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Kampung					
80	Sumatera Utara	Deli Serdang	Sunggal	Tanjung Gusta	Kampung tanjung gusta	Badan Perjuangan Rakyat Penungu Indonesia (BPRPI)	8,799	Tanah Adat	- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No. 50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per — 02/Mbu/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Perkebunan Nusantara II
81	Sumatera Utara	Deli Serdang	Batang Kuis	Tumpatan Nibung	Kampung tumpatan nibong	Badan Perjuangan Rakyat Penungu Indonesia (BPRPI)	1,633	Tanah Adat	- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No. 50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per — 02/Mbu/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Perkebunan Nusantara II
82	Sumatera Utara	Deli Serdang	Pantai Labu	Pantai Labu Pekan	Kampung pantai labu pekan	Badan Perjuangan Rakyat Penungu Indonesia (BPRPI)	1,467	Tanah Adat	- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No. 50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per — 02/Mbu/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Perkebunan Nusantara II
83	Sumatera Utara	Deli Serdang	Tanjung Morawa	Bangun Sari		Konsorsium Pembaruan Agraria	119	Tanah Terlantar Bekas HGU	- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No. 50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per — 02/Mbu/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Perkebunan Nusantara II

									Agraria	
84	Sumatera Utara	Pematang Siantar	siantar sitalasari	Gurilla		FUTASI	126	Tanah Terlantar Bekas HGU	- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No. 50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per — 02/Mbu/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Perkebunan Nusantara IV
85	Sumatera Utara	Langkat	Stabat	ara condong	Kampong ara condong	Badan Perjuangan Rakyat Penungu Indonesia (BPRPI)	1,076	Tanah Adat	- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No. 50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per — 02/Mbu/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Perkebunan Nusantara II

No	Lokasi					Organisasi Rakyat/NGO	Luas Wilayah (Ha)	Status Tanah/Hak Atas Tanah	Regulasi Penyelesaian Konflik	NAMA PERUSAHAAN
	Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Kampung					
86	Sumatera Utara	Langkat	Selesai	Mancang	Kampung batu gajah	Badan Perjuangan Rakyat Penungu Indonesia (BPRPI)	796	Tanah Adat	- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No. 50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per — 02/Mbu/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Perkebunan Nusantara II
87	Sumatera Utara	Langkat			Kampung bingai	Badan Perjuangan Rakyat Penungu Indonesia (BPRPI)	11,301	Tanah Adat	- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No. 50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per — 02/Mbu/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Perkebunan Nusantara II
88	Sumatera Utara	Langkat	Binjai	Kampung binjai	Kampung binjai	Badan Perjuangan Rakyat Penungu Indonesia (BPRPI)	8,857	Tanah Adat	- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No. 50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per — 02/Mbu/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Perkebunan Nusantara II
89	Sumatera Utara	Langkat			Kampung cengkeh turi	Badan Perjuangan Rakyat Penungu Indonesia (BPRPI)	4,517	Tanah Adat	- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No. 50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per — 02/Mbu/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018	PT. Perkebunan Nusantara II

									tentang Reforma Agraria	
90	Sumatera Utara	Langkat	Secanggih	Cinta Raja	Kampong cinta raja	Badan Perjuangan Rakyat Penungu Indonesia (BPRPI)	1,890	Tanah Adat	- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No. 50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per – 02/Mbu/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Perkebunan Nusantara II
91	Sumatera Utara	Langkat	Wampu	Pertumbukan	Kampong durian salemak	Badan Perjuangan Rakyat Penungu Indonesia (BPRPI)	971	Tanah Adat	- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No. 50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per – 02/Mbu/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Perkebunan Nusantara II

No	Lokasi					Organisasi Rakyat/NGO	Luas Wilayah (Ha)	Status Tanah/Hak Atas Tanah	Regulasi Penyelesaian Konflik	NAMA PERUSAHAAN
	Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Kampung					
92	Sumatera Utara	Langkat	Wampu	Gohor Lama	Kampung gohor	Badan Perjuangan Rakyat Penungu Indonesia (BPRPI)	3,510	Tanah Adat	- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No. 50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per — 02/Mbu/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Perkebunan Nusantara II
93	Sumatera Utara	Langkat	Hinai		kampung hinai	Badan Perjuangan Rakyat Penungu Indonesia (BPRPI)	9,540	Tanah Adat	- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No. 50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per — 02/Mbu/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Perkebunan Nusantara II
94	Sumatera Utara	Langkat	Secanggang	jaring halus	Kampung jaring halus	Badan Perjuangan Rakyat Penungu Indonesia (BPRPI)	3,798	Tanah Adat	- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No. 50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per — 02/Mbu/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Perkebunan Nusantara II
95	Sumatera Utara	Langkat	Secanggang	karang gading	Kampung karang gading	Badan Perjuangan Rakyat Penungu Indonesia (BPRPI)	2,886	Tanah Adat	- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No. 50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per — 02/Mbu/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018	PT. Perkebunan Nusantara II

									tentang Reforma Agraria	
96	Sumatera Utara	Langkat	Binjai	Kwala Begumit	Kampong kwala begumit	Badan Perjuangan Rakyat Penungu Indonesia (BPRPI)	4,808	Tanah Adat	- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No. 50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per – 02/Mbu/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Perkebunan Nusantara II
97	Sumatera Utara	Langkat	Secanggang	Kwala Besar	Kampong kwala besar	Badan Perjuangan Rakyat Penungu Indonesia (BPRPI)	3,897	Tanah Adat	- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No. 50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per – 02/Mbu/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Perkebunan Nusantara II

No	Lokasi					Organisasi Rakyat/NGO	Luas Wilayah (Ha)	Status Tanah/Hak Atas Tanah	Regulasi Penyelesaian Konflik	NAMA PERUSAHAAN
	Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Kampung					
98	Sumatera Utara	Langkat			Kampung nangka	Badan Perjuangan Rakyat Penungu Indonesia (BPRPI)	2,354	Tanah Adat	- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No. 50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per — 02/Mbu/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Perkebunan Nusantara II
99	Sumatera Utara	Langkat	Stabat	Pantai Gemi	Kampung pantai gemi	Badan Perjuangan Rakyat Penungu Indonesia (BPRPI)	3,470	Tanah Adat	- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No. 50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per — 02/Mbu/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Perkebunan Nusantara II
100	Sumatera Utara	Langkat			kampung paya kangkong	Badan Perjuangan Rakyat Penungu Indonesia (BPRPI)	2,486	Tanah Adat	- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No. 50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per — 02/Mbu/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Perkebunan Nusantara II
101	Sumatera Utara	Langkat	Wampu	Pertumbukan	Kampung pertumbukan	Badan Perjuangan Rakyat Penungu Indonesia (BPRPI)	1,256	Tanah Adat	- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No. 50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per — 02/Mbu/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018	PT. Perkebunan Nusantara II

									tentang Reforma Agraria	
102	Sumatera Utara	Langkat	Secanggang	Secanggang	Kampung secanggang	Badan Perjuangan Rakyat Penungu Indonesia (BPRPI)	8,593	Tanah Adat	- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No. 50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per – 02/Mbu/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Perkebunan Nusantara II
103	Sumatera Utara	Langkat			Kampung sei benang	Badan Perjuangan Rakyat Penungu Indonesia (BPRPI)	917	Tanah Adat	- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No. 50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per – 02/Mbu/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Perkebunan Nusantara II

No	Lokasi					Organisasi Rakyat/NGO	Luas Wilayah (Ha)	Status Tanah/Hak Atas Tanah	Regulasi Penyelesaian Konflik	NAMA PERUSAHAAN
	Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Kampung					
104	Sumatera Utara	Langkat	Selesai	Sei Limbat	Kampung sei limbat	Badan Perjuangan Rakyat Penungu Indonesia (BPRPI)	1,383	Tanah Adat	- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No. 50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per — 02/Mbu/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Perkebunan Nusantara II
105	Sumatera Utara	Langkat	Selesai	Selesai	Kampung selesai	Badan Perjuangan Rakyat Penungu Indonesia (BPRPI)	14,875	Tanah Adat	- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No. 50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per — 02/Mbu/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Perkebunan Nusantara II
106	Sumatera Utara	Langkat	Stabat		Kampung stabat	Badan Perjuangan Rakyat Penungu Indonesia (BPRPI)	826	Tanah Adat	- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No. 50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per — 02/Mbu/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Perkebunan Nusantara II
107	Sumatera Utara	Langkat	Secanggang	Teluk	Kampung telok	Badan Perjuangan Rakyat Penungu Indonesia (BPRPI)	1,748	Tanah Adat	- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No. 50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per — 02/Mbu/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018	PT. Perkebunan Nusantara II

									tentang Reforma Agraria	
108	Sumatera Utara	Medan			Kampung laut dendang	Badan Perjuangan Rakyat Penungu Indonesia (BPRPI)	3,551	Tanah Adat	- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No. 50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per – 02/Mbu/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Perkebunan Nusantara II
109	Sumatera Utara	Medan	Medan Amplas	amplas	Kampung amplas	Badan Perjuangan Rakyat Penungu Indonesia (BPRPI)	2,988	Tanah Adat	- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No. 50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per – 02/Mbu/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Perkebunan Nusantara II

No	Lokasi					Organisasi Rakyat/NGO	Luas Wilayah (Ha)	Status Tanah/Hak Atas Tanah	Regulasi Penyelesaian Konflik	NAMA PERUSAHAAN
	Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Kampung					
110	Sumatera Utara	Medan	Medan Maimun	Kampung baru	Kampung baru	Badan Perjuangan Rakyat Penungu Indonesia (BPRPI)	6,336	Tanah Adat	- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No. 50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per — 02/Mbu/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Perkebunan Nusantara II
111	Sumatera Utara	Medan	Medan Labuhan	Sei Mati	Kampung batang kilat seruwai sei mati	Badan Perjuangan Rakyat Penungu Indonesia (BPRPI)	1,300	Tanah Adat	- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No. 50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per — 02/Mbu/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Perkebunan Nusantara II
112	Sumatera Utara	Medan	Medan Denai	denai	Kampung denai	Badan Perjuangan Rakyat Penungu Indonesia (BPRPI)	524	Tanah Adat	- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No. 50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per — 02/Mbu/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Perkebunan Nusantara II
113	Sumatera Utara	Medan			Kampung jatirejo	Badan Perjuangan Rakyat Penungu Indonesia (BPRPI)	600	Tanah Adat	- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No. 50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per — 02/Mbu/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018	PT. Perkebunan Nusantara II

									tentang Reforma Agraria	
114	Sumatera Utara	Medan	Medan Deli	Mabar	Kampong mabar	Badan Perjuangan Rakyat Penungu Indonesia (BPRPI)	9,661	Tanah Adat	- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No. 50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per – 02/Mbu/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Perkebunan Nusantara II
115	Sumatera Utara	Medan	Medan Amplas	Desa Marendal 1	Kampong marendal	Badan Perjuangan Rakyat Penungu Indonesia (BPRPI)	1,454	Tanah Adat	- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No. 50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per – 02/Mbu/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Perkebunan Nusantara II

No	Lokasi					Organisasi Rakyat/NGO	Luas Wilayah (Ha)	Status Tanah/Hak Atas Tanah	Regulasi Penyelesaian Konflik	NAMA PERUSAHAAN
	Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Kampung					
116	Sumatera Utara	Medan	medan area		Kampong medan area	Badan Perjuangan Rakyat Penungu Indonesia (BPRPI)	1,258	Tanah Adat	- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No. 50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per — 02/Mbu/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Perkebunan Nusantara II
117	Sumatera Utara	Medan	Medan Denai dan Percut Sei Tuan		Kampong menteng	Badan Perjuangan Rakyat Penungu Indonesia (BPRPI)	1,892	Tanah Adat	- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No. 50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per — 02/Mbu/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Perkebunan Nusantara II
118	Sumatera Utara	Medan	Medan Marelan	Rengas Pulau	Kampong rengas pulau	Badan Perjuangan Rakyat Penungu Indonesia (BPRPI)	1,325	Tanah Adat	- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No. 50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per — 02/Mbu/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Perkebunan Nusantara II
119	Sumatera Utara	Medan	Medan Marelan	Tanah Enam Ratus	Kampong tanah enam ratus	Badan Perjuangan Rakyat Penungu Indonesia (BPRPI)	2,416	Tanah Adat	- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No. 50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per — 02/Mbu/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Perkebunan Nusantara II

									Agraria	
120	Sumatera Utara	Medan	Medan Deli	Tanjung Mulia	Kampong tanjung mulia	Badan Perjuangan Rakyat Penungu Indonesia (BPRPI)	1,845	Tanah Adat	- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No. 50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per — 02/Mbu/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Perkebunan Nusantara II
121	Sumatera Utara	Medan	Medan Tembung	Tembung	Kampong tembong	Badan Perjuangan Rakyat Penungu Indonesia (BPRPI)	89	Tanah Adat	- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No. 50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per — 02/Mbu/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Perkebunan Nusantara II

No	Lokasi					Organisasi Rakyat/NGO	Luas Wilayah (Ha)	Status Tanah/Hak Atas Tanah	Regulasi Penyelesaian Konflik	NAMA PERUSAHAAN
	Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Kampung					
122	Sumatera Utara	Medan	Medan Marelan	Terjun	Kampung terjun	Badan Perjuangan Rakyat Penungu Indonesia (BPRPI)	4,296	Tanah Adat	- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No. 50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per — 02/Mbu/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Perkebunan Nusantara II
123	Sumatera Utara	Pematang Siantar	Siantar Utara	Martoba		Persatuan Petani Siantar Simalungun (PPSS)	152	Tanah Terlantar Bekas HGU	- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No. 50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per — 02/Mbu/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Perkebunan Nusantara II
124	Sumatera Utara	Simalungun	Siantar	silampuyang		SETASI	400	Tanah Terlantar Bekas HGU	- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No. 50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per — 02/Mbu/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Perkebunan Nusantara IV
125	Sumatera Utara	Pematang Siantar	siantar martoba	tambun na bolon		Persatuan Petani Siantar Simalungun (PPSS)	247	Tanah Terlantar Bekas HGU	- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No. 50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per — 02/Mbu/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Perkebunan Nusantara III
									- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No. 50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per —	

126	Sumatera Utara	Simalungun	Bandar	Bandar Betsy		Konsorsium Pembaruan Agraria	943	Tanah Terlantar Bekas HGU	02/Mbu/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Perkebunan Nusantara III
127	Sumatera Utara	Pematang Siantar	Nagapita			Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM)	60	Tanah Negara (TNI)	- Percepatan Proses Penetapan Tanah Terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi Tanah melalui Perpres No86/2018 tentang Reforma Agraria	Komando Resort Militer 022/PT
128	Sumatera Utara	Serdang Bedagai	Pegajahan	Bingkat	Dusun Berkah	BITRA Indonesia	8	Tanah Terlantar Bekas HGU	- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No. 50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per — 02/Mbu/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Perkebunan Nusantara II

No	Lokasi					Organisasi Rakyat/NGO	Luas Wilayah (Ha)	Status Tanah/Hak Atas Tanah	Regulasi Penyelesaian Konflik	NAMA PERUSAHAAN
	Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Kampung					
129	Sumatera Utara	Serdang Bedagai	Dolok Merawan	Bah Damar		Serikat Petani Serdang Bedagai (SPSB)	121	Tanah HGU Aktif	- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No. 50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per — 02/Mbu/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Perkebunan Nusantara IV
130	Sumatera Selatan	ogan ilir	tanjung batu	Seribandung		Solidaritas Perempuan Palembang	3,218	Tanah HGU Aktif	- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No. 50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per — 02/Mbu/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Perkebunan Nusantara VII
131	Lampung	Lampung Selatan	Negeri Katon	Halangan Ratu		Konsorsium Pembaruan Agraria	1,700	Tanah HGU Aktif	- Penghapusan Aset Negara melalui PermenKeu No. 50/Pmk.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara jo Permen BUMN No. Per — 02/Mbu/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara - Penetapan tanah terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi tanah melalui Perpres No.86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Perkebunan Nusantara VII
JUMLAH								288,431.81		

KONSORSIUM PEMBARUAN AGRARIA, 2019
DATA LOKASI PRIORITAS REFORMA AGRARIA DI DALAM HGU SWASTA

No	Lokasi					Organisasi Rakyat/NGO	Luas Wilayah (Ha)	Status Tanah/Hak Atas Tanah	Regulasi Penyelesaian Konflik	NAMA PERUSAHAAN
	Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Kampung					
1	Banten	Banten	Pandeglang	Desa Citalahab dan Desa Pasirawi		Jaringan Kerja Tani (JAKTANI)	54	Tanah Terlantar Bekas HGU	- Percepatan Proses Penetapan Tanah Terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi Tanah melalui Perpres No86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Kadu Gedong Raya
2	Banten	Lebak	Cimarga dan Leuwidamar	Gunung Anten, Wantisari & Lebakparahiang	Sampang Peundeuy	Persatuan Petani Banten	145	Tanah Terlantar Bekas HGU	- Percepatan Proses Penetapan Tanah Terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi Tanah melalui Perpres No86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. The Bantam & Preanger Rubber Co. Ltd
3	Jawa Barat	Bogor	Nanggung	Cisarua, Curugbitung, Nanggung		Amanat	311	Tanah Terlantar Bekas HGU	- Percepatan Proses Penetapan Tanah Terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi Tanah melalui Perpres No86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Hevea Indonesia (Hevindo)
4	Jawa Barat	Sumedang	Wado dan Saritunggal	Desa Cikareo Selatan, Cikareo Utara, Sarimekar, Tarikolot, Desa Mulyajaya		Serikat Tani Kerakyatan Sumedang (STKS)	200	Tanah Terlantar Bekas HGU	- Percepatan Proses Penetapan Tanah Terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi Tanah melalui Perpres No86/2018 tentang Reforma Agraria	Anglo-Indonesian Corporation Limited

5	Jawa Barat	Cianjur	Kadupandak	Warga Asih, warga sari, sukaraharja, neglasari, ganda sari.....		Paguyuban Petani Cianjur (PPC)	870	Tanah Terlantar Bekas HGU	- Percepatan Proses Penetapan Tanah Terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi Tanah melalui Perpres No86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Banyu Sagara
6	Jawa Barat	Cianjur	Cibeber, Kadupandak, Bojong Picung	Sukaraharja, Wargasari dan Neglasari		Paguyuban Petani Cianjur (PPC)	570	Tanah Terlantar Bekas HGU	- Percepatan Proses Penetapan Tanah Terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi Tanah melalui Perpres No86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Cibogo Geulis
7	Jawa Barat	Garut	Cikajang	Pamegatan	Pamegatan	Serikat Petani Badega (SPB)	210.17	Tanah Terlantar Bekas HGU	- Percepatan Proses Penetapan Tanah Terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi Tanah melalui Perpres No86/2018 tentang Reforma Agraria	PD. Kerta Gmah Ripah
8	Jawa Barat	Garut	Cikajang	Kramat Wangi	Cipangramatan	Serikat Petani Badega (SPB)	560	Tanah Terlantar Bekas HGU	- Tanah sudah didistribusikan namun belum ada akses reform pascaredistribusi	PT. Surya Andaka Mustika
9	Jawa Barat	Garut	Cisurupan	Sukawargi	Sukawargi	Serikat Tani Selekt	119	Tanah Terlantar Bekas HGU	- Percepatan Proses Penetapan Tanah Terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi Tanah melalui Perpres No86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Hardjasari

No	Lokasi					Organisasi Rakyat/NGO	Luas Wilayah (Ha)	Status Tanah/Hak Atas Tanah	Regulasi Penyelesaian Konflik	NAMA PERUSAHAAN
	Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Kampung					
10	Jawa Barat	Tasikmalaya	Karangnunggal	Karangnunggal	ciawitali, Cikadudan Cimuncang	Serikat Petani Pasundan Tasikmalaya (SPP Tasikmalaya)	514	Tanah Terlarang Bekas HGU	- Percepatan Proses Penetapan Tanah Terlarang melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlarang - Redistribusi Tanah melalui Perpres No86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Pernas
11	Jawa Barat	Ciamis	Cipaku	Muktisari	Cijoho	Serikat Petani Pasundan (SPP Ciamis)	40.72	Tanah Terlarang Bekas HGU	- Percepatan Proses Penetapan Tanah Terlarang melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlarang - Redistribusi Tanah melalui Perpres No86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Maloya
12	Jawa Barat	Ciamis	Banjaranyar	Banjaranyar	Bulaksitu	Serikat Petani Pasundan (SPP Ciamis)	115	Tanah Terlarang Bekas HGU	- Percepatan Proses Penetapan Tanah Terlarang melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlarang - Redistribusi Tanah melalui Perpres No86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Bukit Jonggol Asri
13	Jawa Barat	Ciamis	Banjaranyar	Cikaso	Sukapura	Serikat Petani Pasundan (SPP Ciamis)	75.12	Tanah Terlarang Bekas HGU	- Percepatan Proses Penetapan Tanah Terlarang melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlarang - Redistribusi Tanah melalui Perpres No86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Bukit Jonggol Asri
14	Jawa Barat	Ciamis	Banjaranyar	Cigayam	Garunggang	Serikat Petani Pasundan (SPP Ciamis)	68.41	Tanah Terlarang Bekas HGU	- Percepatan Proses Penetapan Tanah Terlarang melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlarang - Redistribusi Tanah melalui Perpres No86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Bukit Jonggol Asri
15	Jawa Barat	Ciamis	Banjaranyar	Pasawahan	Mekarsari	Serikat Petani Pasundan (SPP Ciamis)	96	Tanah Terlarang Bekas HGU	- Percepatan Proses Penetapan Tanah Terlarang melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlarang - Redistribusi Tanah melalui Perpres No86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Bukit Jonggol Asri

16	Jawa Barat	Ciamis	Banjaranyar	Kalijaya	Wanarasa	Serikat Petani Pasundan (SPP Ciamis)	37	Tanah Terlantar Bekas HGU	- Percepatan Proses Penetapan Tanah Terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi Tanah melalui Perpres No86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Bukit Jonggol Asri
17	Jawa Barat	Ciamis	Tambaksari	Kaso	Cikopeng	Serikat Petani Pasundan (SPP Ciamis)	31	Tanah Terlantar Bekas HGU	- Percepatan Proses Penetapan Tanah Terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi Tanah melalui Perpres No86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Bukit Jonggol Asri
18	Jawa Barat	Ciamis	Tambaksari	Sukasari	Cibitung	Serikat Petani Pasundan (SPP Ciamis)	32	Tanah Terlantar Bekas HGU	- Percepatan Proses Penetapan Tanah Terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi Tanah melalui Perpres No86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Bukit Jonggol Asri

No	Lokasi					Organisasi Rakyat/NGO	Luas Wilayah (Ha)	Status Tanah/Hak Atas Tanah	Regulasi Penyelesaian Konflik	NAMA PERUSAHAAN
	Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Kampung					
19	Jawa Tengah	Pemalang	Petarukan	Klareyan		Serikat Tani Independen Pemalang (STIP)	160	Tanah Terlantar Bekas HGU	- Percepatan Proses Penetapan Tanah Terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi Tanah melalui Perpres No86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Mackenzie
20	Jawa Tengah	Batang	Bandar	Tumbrep		Forum Perjuangan Petani Batang (FPPB)	90	Tanah Terlantar Bekas HGU	- Percepatan Proses Penetapan Tanah Terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi Tanah melalui Perpres No86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Tratak
21	Jawa Tengah	Batang	Blado	Pagilaran, Kalisari, Gondang, Bismo, dan Bawang		Forum Perjuangan Petani Batang (FPPB)	450	Tanah Terlantar Bekas HGU	- Percepatan Proses Penetapan Tanah Terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi Tanah melalui Perpres No86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Pagilaran Unit Produksi Sidoharjo
22	Jawa Tengah	Batang	Tulis	Kenconorejo, Simbangjati, Panjer, dan Wonokerso		Forum Perjuangan Petani Batang (FPPB)	152	Tanah Terlantar Bekas HGU	- Percepatan Proses Penetapan Tanah Terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi Tanah melalui Perpres No86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Simbang Jati Bahagia
23	Jawa Tengah	Batang	Tulis	Wonosegoro, Posong, Batiombo dan Sembojo		Forum Perjuangan Petani Batang (FPPB)	250	Tanah Terlantar Bekas HGU	- Percepatan Proses Penetapan Tanah Terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi Tanah melalui Perpres No86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Simbang Jati Bahagia
24	Jawa Tengah	Banjarnegara	Puggelan	Puggelan		Himpunan Tani Masyarakat Banjarnegara (HITAMBARA)	80	Tanah Terlantar Bekas HGU	- Percepatan Proses Penetapan Tanah Terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi Tanah melalui Perpres No86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Pakisadji Banyumas
						Sarekat		Tanah Terlantar	- Percepatan Proses Penetapan Tanah Terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban	

25	Jawa Tengah	Pemalang	Belik	Sikasur	Dukuh Sodong	Pengorganisasian Rakyat (SPR)	83	Bekas HGU	dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi Tanah melalui Perpres No86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Kencana Sikasur
26	Jawa Tengah	Cilacap	Cipari	Mulyadadi		PP. SeTAM	45	Tanah Terlantar Bekas HGU	- Percepatan Proses Penetapan Tanah Terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi Tanah melalui Perpres No86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Jawane
27	Jawa Tengah	Cilacap	Cipari	Mekarsari, Karangreja, Kutasari, Sidasari, Carui		PP. SeTAM	500	Tanah Terlantar Bekas HGU	- Percepatan Proses Penetapan Tanah Terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi Tanah melalui Perpres No86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Rumpun Sari Antan

No	Lokasi					Organisasi Rakyat/NGO	Luas Wilayah (Ha)	Status Tanah/Hak Atas Tanah	Regulasi Penyelesaian Konflik	NAMA PERUSAHAAN
	Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Kampung					
28	Jawa Tengah	Cilacap	Jeruklegi	Sawangan		PP. SeTAM	62.0	Tanah Terlantar Bekas HGU	- Percepatan Proses Penetapan Tanah Terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi Tanah melalui Perpres No86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Adiwiyata Panca Arga
29	Jawa Tengah	Magelang	Salaman	Ngargoretno		PP. SeTAM	20	Tanah Terlantar Bekas HGU	- Percepatan Proses Penetapan Tanah Terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi Tanah melalui Perpres No86/2018 tentang Reforma Agraria	
30	Jawa Tengah	Banyumas	Ajibarang	Darmakradenan	Cipecang	Serikat Tani Amanat Penderitaan Rakyat (STAM AMPERA)	228	Tanah Terlantar Bekas HGU	- Percepatan Proses Penetapan Tanah Terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi Tanah melalui Perpres No86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Rumpun Sari Antan
31	Jawa Tengah	Semarang	Bandungan	Kenteng dan Candi		Lembaga Bantuan Hukum Semarang (LBH SEMARANG)	198	Tanah Terlantar Bekas HGU	- Percepatan Proses Penetapan Tanah Terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi Tanah melalui Perpres No86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Sinar Kartosuro
32	Jawa Timur	Blitar	Wlingi	Ngadirenggo	Sengon	Paguyuban Petani Aryo Blitar (PPAB) dan Sitas Desa	518	Tanah Terlantar Bekas HGU	- Percepatan Proses Penetapan Tanah Terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi Tanah melalui Perpres No86/2018 tentang Reforma Agraria	PT Dewi Sri
33	Jawa Timur	Blitar	Gandusari	Soso	Nyunyur	Paguyuban Petani Aryo Blitar (PPAB) dan Sitas Desa	368	Tanah Terlantar Bekas HGU	- Percepatan Proses Penetapan Tanah Terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi Tanah melalui Perpres No86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Kismo Handayani
									- Percepatan Proses Penetapan Tanah	

34	Jawa Timur	Blitar	Nglegok	Modangan	Karangnongko	Paguyuban Petani Aryo Blitar (PPAB) dan Sitas Desa	180	Tanah HGU Aktif	Terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi Tanah melalui Perpres No86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Dewi Sri
35	Jawa Timur	Blitar	Gandusari	Gadungan dan Sumberagung	Dusun Sukomulyo dan Dusun Rejokaton	Paguyuban Petani Aryo Blitar (PPAB) dan Sitas Desa	557	Tanah Terlantar Bekas HGU	- Percepatan Proses Penetapan Tanah Terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi Tanah melalui Perpres No86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Rotorejo Kruwuk
36	Jawa Timur	Blitar	Doko	Sidorejo	Branggah Banaran	Paguyuban Petani Aryo Blitar (PPAB) dan Sitas Desa	531	Tanah HGU Aktif	- Percepatan Proses Penetapan Tanah Terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi Tanah melalui Perpres No86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Gapri

No	Lokasi					Organisasi Rakyat/NGO	Luas Wilayah (Ha)	Status Tanah/Hak Atas Tanah	Regulasi Penyelesaian Konflik	NAMA PERUSAHAAN
	Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Kampung					
37	Bali	Buleleng	Gerokgak	Sumber klampok	Sindangpasir	Serikat Tani Sumber klampok (STS)	583	Tanah Terlantar Bekas HGU	- Percepatan Proses Penetapan Tanah Terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi Tanah melalui Perpres No86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Margarana PT. Dharmajati Abadi
38	Sulawesi Utara	Minahasa Tenggara	Belang	Mangkit		Serikat Petani Minahasa	443	Tanah Terlantar Bekas HGU	- Tanah sudah didistribusikan namun belum ada akses reform dari pemerintah - Percepatan Proses Penetapan Tanah Terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi Tanah melalui Perpres No86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Asiatik
39	Sulawesi Utara	Minahasa Selatan	Tenga	Sapa		Serikat Petani Sapa Raya	20	Tanah Terlantar Bekas HGU	- Percepatan Proses Penetapan Tanah Terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi Tanah melalui Perpres No86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Batu Kapal
40	Sulawesi Tengah	Tolitoli	Dondo	Anggasan		Serikat Tani Pejuang Tanah Air	890	Tanah HGU Aktif	- Percepatan Proses Penetapan Tanah Terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi Tanah melalui Perpres No86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Bukit Berlian
41	Sulawesi Tengah	Donggala	Banawa Selatan	Lumbu Lama		Serikat Tani Pejuang Tanah Air	8,961	Tanah Adat	- Percepatan Proses Penetapan Tanah Terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi Tanah melalui Perpres No86/2018 tentang Reforma Agraria	-
42	Sulawesi Tengah	Tolitoli	Ogodeide	Kamalu	Dusun IV Kumbang	Serikat Perjuangan Tani Nelayan Tolitoli (SPTNT)	80	Tanah Negara	- Percepatan Proses Penetapan Tanah Terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi Tanah melalui Perpres No86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Citra Mulia Perkasa
43	Sulawesi Tengah	Tolitoli	Lampasio	Lampasio		Forum Petani	145	Tanah Hak Milik	- Percepatan Proses Penetapan Tanah Terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar	PT. Citra Mulia Perkasa

						Cengkeh			- Redistribusi Tanah melalui Perpres No86/2018 tentang Reforma Agraria	
44	Sulawesi Tengah	TOJO UNA-UNA	Togean	Matobiai		Forum Nelayan Togean (FNT)	50	Tanah Terlantar Bekas HGU	- Percepatan Proses Penetapan Tanah Terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi Tanah melalui Perpres No86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Gobel
45	Sulawesi Tengah	TOJO UNA-UNA	Togean	Lambanato		Forum Nelayan Togean (FNT)	25	Tanah Terlantar Bekas HGU	- Percepatan Proses Penetapan Tanah Terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi Tanah melalui Perpres No86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Gobel

No	Lokasi					Organisasi Rakyat/NGO	Luas Wilayah (Ha)	Status Tanah/Hak Atas Tanah	Regulasi Penyelesaian Konflik	NAMA PERUSAHAAN
	Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Kampung					
46	Sulawesi Tengah	Poso	Pamona Tenggara	Barati	Barati	Solidaritas Perempuan Sintuwu Raya Poso	9000	Tanah Adat	- Percepatan Proses Penetapan Tanah Terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi Tanah melalui Perpres No86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Sawit Jaya Abadi
47	Sulawesi Tengah	Banggai	Bunta	Bohotokong		Ortabun	138	Tanah Terlantar Bekas HGU	- Percepatan Proses Penetapan Tanah Terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi Tanah melalui Perpres No86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Anugerah Saritama Abadi
48	Sulawesi Tenggara	Konawe Selatan	Lainea	Lalongombu		Lembaga Adat Lalongombu	963	Tanah Rumpun	- Percepatan Proses Penetapan Tanah Terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi Tanah melalui Perpres No86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Kapas Indonesia
49	Sulawesi Tenggara	Konawe Selatan	Kolono	UPT Roda		Serikat Tani Konawe Selatan (STKS)	124	Tanah Hak Milik Transmigrasi	- Percepatan Proses Penetapan Tanah Terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi Tanah melalui Perpres No86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Tiran
50	Sulawesi Tenggara	Konawe Selatan	Landonu dan Ranometo Barat	UPT Arongo		Serikat Tani Konawe Selatan (STKS)	1.500	Tanah Hak Milik Transmigrasi	- Percepatan Proses Penetapan Tanah Terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi Tanah melalui Perpres No86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Merbau Jaya Indah Raya Group
51	Sulawesi Tenggara	Konawe Selatan	Moramo	UPT AMOHOLA I	Puduria	Serikat Tani Konawe Selatan (STKS)	334	Tanah Hak Milik Transmigrasi	- Pemenuhan lahan usaha satu dan dua melalui PP No. 3/2014 tentang Pelaksanaan UU No. 29/2009 tentang Ketransmigrasian - Redistribusi Tanah melalui Perpres	PT. Tiran

									tentang Reforma Agraria	
52	Sulawesi Tenggara	Konawe Selatan	Moramo	UPT AMOHOLA II	Serikat Tani Konawe Selatan (STKS)	394	Tanah Hak Milik Transmigrasi	- Pemenuhan lahan usaha satu dan dua melalui PP No. 3/2014 tentang Pelaksanaan UU No. 29/2009 tentang Ketransmigrasian - Redistribusi Tanah melalui Perpres No86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Tiran	
53	Sulawesi Tenggara	Konawe Selatan	Moramo	Pudaria Jaya	Serikat Tani Konawe Selatan (STKS)	683	Tanah Hak Milik Transmigrasi	- Pemenuhan lahan usaha satu dan dua melalui PP No. 3/2014 tentang Pelaksanaan UU No. 29/2009 tentang Ketransmigrasian - Redistribusi Tanah melalui Perpres No86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Tiran	
54	Sulawesi Tenggara	Konawe Selatan	Palanga	Tolihe	Serikat Tani Konawe Selatan (STKS)	240	Tanah Hak Milik Transmigrasi	- Pemenuhan lahan usaha satu dan dua melalui PP No. 3/2014 tentang Pelaksanaan UU No. 29/2009 tentang Ketransmigrasian - Redistribusi Tanah melalui Perpres No86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Merbau Jaya Indah Raya Group	

No	Lokasi					Organisasi Rakyat/NGO	Luas Wilayah (Ha)	Status Tanah/Hak Atas Tanah	Regulasi Penyelesaian Konflik	NAMA PERUSAHAAN
	Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Kampung					
55	Sulawesi Tenggara	Konawe Selatan		Lainea, Laeya, Palangga, Palangga Selatan, Ranomeeto, Ranomeeto Barat, Landono, Mowila, Angata		Lembaga Adat Sarano Wonua	2,011	Tanah Adat	- Percepatan Proses Penetapan Tanah Terlarang melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlarang - Redistribusi Tanah melalui Perpres No86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Sumber Madu
56	sulawesi tenggara	konawe selatan	Mowila	Rakawuta		Serikat Tani Konawe Selatan (STKS)	400	Tanah Hak Milik Transmigrasi	belum ada peta	PT. Merbau Jaya Indah Raya Group
57	Sulawesi Tenggara	Konawe Utara		Wiwirano		Komunitas Petani Sawit (KPS)	6,000	Tanah HGU Aktif	- Percepatan Proses Penetapan Tanah Terlarang melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlarang - Redistribusi Tanah melalui Perpres No86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Damai Jaya Lestari
58	Sulawesi Tenggara	Konawe Utara		Wiwirano, Langgikima		Komunitas Petani Sawit (KPS)	15,000	Tanah HGU Aktif	- Percepatan Proses Penetapan Tanah Terlarang melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlarang - Redistribusi Tanah melalui Perpres No86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Damai Jaya Lestari
59	Sulawesi Tenggara	Konawe Utara		Wiwirano, Langgikima		Masyarakat Adat Sambandete-Walandawe	5,000	Tanah Adat	- Percepatan Proses Penetapan Tanah Terlarang melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlarang - Redistribusi Tanah melalui Perpres No86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Sultra Prima Lestari
60	Sulawesi Tenggara	Kolaka Timur	poli-Polia	Wonumabute, Laolera, Dangia, Pemburea	Tolaki dan Mekonga	Forsda Kolaka	2,250	Tanah Terlarang Bekas HGU	- Percepatan Proses Penetapan Tanah Terlarang melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlarang - Redistribusi Tanah melalui Perpres No86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Hasram Niaga Nusantara PT. Perkebunan Ladongi.
									- Percepatan Proses Penetapan Tanah Terlarang melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban	

61	Sulawesi Tenggara	Kolaka Timur	Tinondo	Sulewatu		Forsda Kolaka	3,547	Tanah Adat	dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi Tanah melalui Perpres No86/2018 tentang Reforma Agraria	
62	Sulawesi Selatan	Luwu Utara	Seko	Padang Balua, Hono, Marante, Taloto, Padang Raya, dan Lodang	Seko Padang	Perkumpulan WALLACEA Palopo	23,718	Tanah Adat	- Percepatan Proses Penetapan Tanah Terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi Tanah melalui Perpres No86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Seko Fajar Plantation
63	Sulawesi Selatan	Gowa	Tinggimoncong	Pattapaang	Buluballea	Konsorsium Pembaruan Agraria/AMAN Gowa	35	Tanah Hak Milik	- Percepatan Proses Penetapan Tanah Terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi Tanah melalui Perpres No86/2018 tentang Reforma Agraria	

No	Lokasi					Organisasi Rakyat/NGO	Luas Wilayah (Ha)	Status Tanah/Hak Atas Tanah	Regulasi Penyelesaian Konflik	NAMA PERUSAHAAN
	Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Kampung					
64	Sumatera Utara	Dairi	Parbuluan	Parbuluan I, II, dan III	Kampung adat Bius Lottung Sinaga Situmorang	Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM)	4,500	Tanah Adat	- Percepatan Proses Penetapan Tanah Terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan - Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi Tanah melalui Perpres No86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Global Agro Perkasa
65	Sumatera Utara	Labuhanbatu Selatan	Kampung Rakyat	Meranti	Menanti	Formal	716	Tanah HGU Aktif	- Percepatan Proses Penetapan Tanah Terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan - Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi Tanah melalui Perpres No86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Perusahaan Perkebunan Tolan Tiga Indonesia
66	Sumatera Utara	Mandailing Natal	Natal	Bintuas		Konsorsium Pembaruan Agraria	6,250	Tanah HGU Aktif	- Percepatan Proses Penetapan Tanah Terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan - Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi Tanah melalui Perpres No86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Rimba Mujur Mahkota PT. Dinamika Inti Sentosa
67	Sumatera Utara	Simalungun	Bosar Maligas	Boluk Nagori		Konsorsium Pembaruan Agraria	600	Tanah HGU Aktif	- Percepatan Proses Penetapan Tanah Terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan - Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi Tanah melalui Perpres No86/2018 tentang Reforma Agraria	
68	Sumatera Utara	Langkat	Sei Bingai	Tanjung Gunung	Dusun Kemerahen	BITRA Indonesia	110	Tanah HGU Aktif	- Percepatan Proses Penetapan Tanah Terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan - Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi Tanah melalui Perpres No86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Serdang Hulu
69	Sumatera Utara	Labuhanbatu Utara	Aek Kuo	Desa Aek Korsik	Kampung Sidomukti	KTPHS / IKOHI Sumut / HaRI	82	Tanah HGU Aktif	- Percepatan Proses Penetapan Tanah Terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan - Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi Tanah melalui Perpres No86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Smart Tbk
									- Percepatan Proses Penetapan Tanah Terlantar	

70	Jambi	Tebo	Tebo Ilir	Teluk Rendah		Serikat Tani Tebo (STT)	1,739	Tanah HGU Aktif	melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi Tanah melalui Perpres No86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Citra Manunggal Mandiri
71	Sumatera Selatan	Musi Rawas Utara	Nibung	Tebing Tinggi	Trans Sosial Desa Tebing Tinggi	Konsorsium Pembaruan Agraria	1,400	Tanah Hak Milik Transmigrasi	- Percepatan Proses Penetapan Tanah Terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi Tanah melalui Perpres No86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. London Sumatra
72	Sumatera Selatan	Ogan Komering Ilir	Air Sugihan	Nusantara		Walhi Sumsel	1,431	Tanah HGU Aktif	- Percepatan Proses Penetapan Tanah Terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi Tanah melalui Perpres No86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Selatan Agro Makmur

No	Lokasi					Organisasi Rakyat/NGO	Luas Wilayah (Ha)	Status Tanah/Hak Atas Tanah	Regulasi Penyelesaian Konflik	NAMA PERUSAHAAN
	Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Kampung					
73	Sumatera Selatan	Musi Rawas	Megang Sakti	Muara Megang		Walhi Sumsel	1,700	Tanah Negara	- Percepatan Proses Penetapan Tanah Terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan - Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi Tanah melalui Perpres No86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. London Sumatra
74	Bengkulu	Bengkulu Utara	Pondok Kelap	Talang Bosen		Serikat Tani Bengkulu (STaB)	1,400	Tanah Terlantar Bekas HGU	- Percepatan Proses Penetapan Tanah Terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan - Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi Tanah melalui Perpres No86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Ika Hasfam
75	Bengkulu	Bengkulu Utara	Ketahun	Pasar Ketahun		Serikat Tani Bengkulu (STaB)	785	Tanah HGU Aktif	- Percepatan Proses Penetapan Tanah Terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan - Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi Tanah melalui Perpres No86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Pamor Ganda
76	Bengkulu	Bengkulu Utara	Pinang Raya	Air Sebayur		Serikat Tani Bengkulu (STaB)	219	Tanah HGU Aktif	- Percepatan Proses Penetapan Tanah Terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan - Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi Tanah melalui Perpres No86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Sandabi Indah Lestari
77	Bengkulu	Bengkulu Utara	Putri Hijau	Kota Bani		Serikat Tani Bengkulu (STaB)	538	Tanah HGU Aktif	- Percepatan Proses Penetapan Tanah Terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan - Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi Tanah melalui Perpres No86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Pamor Ganda
78	Bengkulu	Bengkulu Utara	Marga Sakti Seblat	Suka Merindu		Serikat Tani Bengkulu (STaB)		Tanah HGU Aktif	- Percepatan Proses Penetapan Tanah Terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan - Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi Tanah melalui Perpres No86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Agrical

79	Bengkulu	Bengkulu Utara	Marga Sakti Seblat	Suka Medan		Serikat Tani Bengkulu (STaB)	1,625	Tanah HGU Aktif	- Percepatan Proses Penetapan Tanah Terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi Tanah melalui Perpres No86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Agrical
80	Bengkulu	Bengkulu Utara	Marga Sakti Seblat	Suka Negara		Serikat Tani Bengkulu (STaB)		Tanah HGU Aktif	- Percepatan Proses Penetapan Tanah Terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi Tanah melalui Perpres No86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Agrical
81	Bengkulu	Bengkulu Utara	Hulu Palik	Batu Roto		Serikat Tani Bengkulu (STaB)		Tanah Terlantar Bekas HGU	- Percepatan Proses Penetapan Tanah Terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi Tanah melalui Perpres No86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Mangkurajo

No	Lokasi					Organisasi Rakyat/NGO	Luas Wilayah (Ha)	Status Tanah/Hak Atas Tanah	Regulasi Penyelesaian Konflik	NAMA PERUSAHAAN
	Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Kampung					
82	Bengkulu	Bengkulu Utara	Hulu Palik	Pemalang Balam		Serikat Tani Bengkulu (STaB)	200	Tanah Terlarang Bekas HGU	- Percepatan Proses Penetapan Tanah Terlarang melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan - Pendayagunaan Tanah Terlarang - Redistribusi Tanah melalui Perpres No86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Mangkurajo
83	Bengkulu	Bengkulu Utara	Hulu Palik	Batu Raja R		Serikat Tani Bengkulu (STaB)		Tanah Terlarang Bekas HGU	- Percepatan Proses Penetapan Tanah Terlarang melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan - Pendayagunaan Tanah Terlarang - Redistribusi Tanah melalui Perpres No86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Mangkurajo
84	Bengkulu	Bengkulu Utara	Kerlap	Penyangkak		Serikat Tani Bengkulu (STaB)		Tanah HGU Aktif	- Percepatan Proses Penetapan Tanah Terlarang melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan - Pendayagunaan Tanah Terlarang - Redistribusi Tanah melalui Perpres No86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Kultindo Rezeki
85	Bengkulu	Bengkulu Utara	Kerlap	Sengkuang		Serikat Tani Bengkulu (STaB)		Tanah HGU Aktif	- Percepatan Proses Penetapan Tanah Terlarang melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan - Pendayagunaan Tanah Terlarang - Redistribusi Tanah melalui Perpres No86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Kultindo Rezeki
86	Bengkulu	Bengkulu Utara	Kerlap	Tanjung Putus		Serikat Tani Bengkulu (STaB)		Tanah HGU Aktif	- Percepatan Proses Penetapan Tanah Terlarang melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan - Pendayagunaan Tanah Terlarang - Redistribusi Tanah melalui Perpres No86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Kultindo Rezeki
87	Bengkulu	Bengkulu Utara	Kerlap	Alun Dua		Serikat Tani Bengkulu (STaB)	1,500	Tanah HGU Aktif	- Percepatan Proses Penetapan Tanah Terlarang melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan - Pendayagunaan Tanah Terlarang - Redistribusi Tanah melalui Perpres No86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Kultindo Rezeki

88	Bengkulu	Bengkulu Utara	Kerlap	Lubuk Pendam		Serikat Tani Bengkulu (STaB)		Tanah HGU Aktif	- Percepatan Proses Penetapan Tanah Terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi Tanah melalui Perpres No86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Kultindo Rezeki
89	Bengkulu	Bengkulu Utara	Kerlap	Rtalang Jambu		Serikat Tani Bengkulu (STaB)		Tanah HGU Aktif	- Percepatan Proses Penetapan Tanah Terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi Tanah melalui Perpres No86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Kultindo Rezeki
90	Bengkulu	Bengkulu Utara	Ulok Kupai	Pagardin		Serikat Tani Bengkulu (STaB)	1,500		- Percepatan Proses Penetapan Tanah Terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi Tanah melalui Perpres No86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Pamor Ganda

No	Lokasi					Organisasi Rakyat/NGO	Luas Wilayah (Ha)	Status Tanah/Hak Atas Tanah	Regulasi Penyelesaian Konflik	NAMA PERUSAHAAN
	Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Kampung					
91	Lampung	Tulang Bawang	Banjar Margo	Bujuk Agung dan Agung Jaya		Serikat Tani Korban Penggusuran Pt. Bnil (STKGB)	3,000	Tanah HGU Aktif	- Percepatan Proses Penetapan Tanah Terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi Tanah melalui Perpres No86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Bangun Nusa Indah Lampung
92	Lampung	Lampung Tengah	Terusan Nunyai	Nunyai Gunung Batin		Konsorsium Pembaruan Agraria	225	Tanah HGU Aktif	- Percepatan Proses Penetapan Tanah Terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi Tanah melalui Perpres No86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Bumi Sumber Sari Sakti
93	Sumatera Barat	Pasaman Barat	Pasaman	Aia Gadang	Labuah Luruuh	Konsorsium Pembaruan Agraria	2,490	Tanah Terlantar Bekas HGU	- Percepatan Proses Penetapan Tanah Terlantar melalui PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Redistribusi Tanah melalui Perpres No86/2018 tentang Reforma Agraria	PT. Anam Koto
JUMLAH							123,064.48			